

ALTERNATIF SOLUSI KONFLIK AGAMA DI INDONESIA

Oleh: Muh. Rusli
muhammadrusli@yahoo.com

Abstrak

Setiap agama mengandung ajaran “keselamatan dan penghargaan yang tinggi terhadap sesama manusia”. Ajaran agama tersebut memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku penganutnya, tetapi dalam realitasnya tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda terkadang menjadi pemicu konflik agama, walaupun agama bukanlah satu-satunya pemicu konflik di Indonesia. Untuk itu, penting untuk mengembalikan makna agama sebagai “jalan keselamatan”, mempertimbangkan penghapusan term agama samawi (langit) vs. wadh’i (bumi), term agama resmi negara vs. agama non-resmi negara, penguatan dialog dan kerja sama antar pemeluk agama, dan menggagas pendidikan berbasis perdamaian, sebagai alternatif solusi konflik agama di Indonesia. Tidak dinafikan pula pentingnya memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik agama di Indonesia.

Kata Kunci: Konflik Agama – Solusi

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik dalam skop nasional maupun daerah. Kemajemukan itu sifatnya multi dimensional, ada yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, agama dan sebagainya.¹ Dalam bidang agama, majemuknya agama menimbulkan konflik yang sering tidak terelakkan, hal tersebut memberikan kesan yang kuat bahwa agama sangat mudah menjadi alat provokasi dan menimbulkan ketegangan di antara umat beragama. Konflik ini tidak hanya terjadi antar umat beragama tetapi juga di kalangan intern umat beragama, kasus penyerangan FPI terhadap komunitas Ahmadiyah di Parung (Bogor) dan beberapa daerah lainnya merupakan bukti nyata adanya potensi konflik internal agama.

26 Agustus 2012, kita dikejutkan dengan terulangnya konflik di Sampang Madura. Sebagaimana diberitakan media massa, bentrok kembali terjadi antara kelompok Syiah dan anti-Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura sekitar pukul 11.00 WIB. Akibat dari peristiwa ini, dua orang dinyatakan tewas, lima orang luka, dan empat di antara korban luka dalam kondisi kritis. Meskipun para

¹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 127.

pemimpin dan tokoh agama negeri ini silih berganti membantah bahwa konflik tersebut bukanlah konflik agama, tetapi setidaknya konflik tersebut menyadarkan kita betapa bangsa ini “belum mampu” jika tidak ingin mengatakan “gagal” dalam mengantisipasi dan meredakan konflik di daerah-daerah yang notabene bekas konflik yang bernuansa SARA, beberapa tahun lalu. Kasus serupa berpotensi terjadi di berbagai daerah di Indonesia jika penanganan pemerintah masih bergaya reaksioner dan setengah hati. Indonesia yang dikenal dengan budaya santun dan tolerannya, kini diperhadapkan pada kenyataan di mana masyarakat cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, termasuk dalam bidang agama. Berangkat dari fakta tersebut, seyogyanya setiap warga negara ini berupaya mencari solusi terbaik sehingga konflik di Indonesia tidak terulang kembali di masa mendatang.

B. Pembahasan

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perdebatan, pertentangan, dan persaingan baik suka rela maupun terpaksa.² Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.³ Konflik sesungguhnya merupakan sesuatu yang alami, konflik adalah sesuatu yang inheren, demikian juga dengan konflik agama. Konflik agama telah ada ketika agama-agama itu ada. Selama manusia tak mampu membebaskan diri dari *stereotype* negatif tentang agama lain, konflik agama akan terus ada. Konflik agama dapat dimaknai sebagai konflik yang lahir dari pemahaman keagamaan yang keliru dalam menerjemahkan ajaran agama.

Bila kita membuka sejarah kelam kehidupan beragama bangsa Indonesia, maka didapati kenyataan bahwa konflik agama telah menjadi santapan kita sehari-hari melalui pemberian media massa dan jejaring

²Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 4

³Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, diterjemahkan oleh Tri Budhi Sasrio dengan judul *Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 7.

sosial, namun kita belum mampu belajar dari kenyataan tersebut untuk mencari solusi terbaik.

Indonesia telah mengalami banyak insiden kekerasan sejak tahun 1998, mulai dari kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa tahun 1998 di Jakarta, konflik di Maluku tahun 1999-2002, pembersihan etnis Madura di Sampit, Kalimantan Barat tahun 2000, darurat sipil di Aceh, dan konflik Muslim-Kristen di Poso sejak tahun 1998. Azyumardi Azra menyebutkan beberapa kerusuhan massal yang pernah terjadi di Indonesia dan latar belakang terjadinya konflik tersebut, di antaranya:

1. Kerusuhan Timor Timur. Kerusuhan massal di Timor Timur “tidak diragukan lagi” merupakan kerusuhan yang menarik perhatian dunia internasional. Kenyataannya, kerusuhan-kerusuhan tersebut hanyalah sebagian kecil dari permasalahan Timor Timur yang jauh lebih besar, yang telah membentuk imajinasi badan-badan internasional, seperti PBB, pemantau Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Lebih jauh lagi, melalui sudut pandang masyarakat Timor Timur, kerusuhan-kerusuhan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia dan akhirnya menuju kemerdekaan.
2. Kerusuhan Aceh. Kerusuhan di Aceh akibat pemerintah pusat (Jakarta) menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Aceh. Kenyataannya, Jakarta tidak menepati janji-janjinya seperti pengakuan dan implementasi status khusus bagi Aceh. Hasilnya, ketidakpuasan politik dan sosial menyebar luas di Aceh, yang menggiring pada kebangkitan gerakan separatis, yang lebih dikenal dengan Gerakan Darul Islam (1953-1954). Gerakan ini tentunya tidak memperoleh simpati dari banyak orang Indonesia. Pada tanggal 4 Desember 1977, Hasan Tiro memproklamkan berdirinya “Aceh Merdeka”. Sejak saat itu, sejarah Aceh berubah menjadi sasaran kekerasan (penindasan) militer dan ketidakadilan politik maupun ekonomi.
3. Kerusuhan Ambon. Kekerasan massal di Ambon, yang semakin memburuk dan meluas ke berbagai wilayah lain di Provinsi Maluku, mungkin – sebagaimana sering dikutip – merupakan contoh konflik dan kekerasan-kekerasan keagamaan di Indonesia. Pengamatan ini – setidaknya dari permukaan- kemungkinan benar untuk beberapa hal. Konflik dan kekerasan komunal di Ambon dan tempat-tempat lain di provinsi Maluku, seperti Halmahera dan Ternate, melibatkan komunitas Muslim di satu sisi, dan komunitas Protestan di sisi lain. Kekerasan berskala besar tersebut terus berlanjut antara dua kelompok agama, yang tidak hanya mengakibatkan pembunuhan terhadap sejumlah besar orang

(dari kalangan Muslim maupun Kristen), tetapi sekaligus juga pembakaran masjid-masjid, gereja-gereja, rumah-rumah, pasar serta bangunan dan fasilitas umum lainnya. Menurut sebuah laporan (pada tanggal 27 November 1999), kekerasan yang terjadi 11 bulan sebelumnya mengakibatkan 693 orang meninggal, dan hampir 2000 orang terluka serta perusakan terhadap bangunan yang tidak terhitung jumlahnya.

4. Kerusuhan Kalimantan Barat. Kasus di Kalimantan Barat cukup diwarnai oleh konflik etnik yang mengakar antara penduduk asli Dayak (yang kemudian didukung masyarakat Melayu) dan masyarakat pendatang Madura. Faktor keagamaan jelas tidak begitu penting dalam konflik ini, karena ketiga etnik yang terlibat dalam kerusuhan massal tersebut tidak dibedakan atas garis keagamaan. Kelompok pertama terdiri dari masyarakat Dayak, yang sebagian besar beragama Kristen dan masyarakat Melayu yang beragama Islam. Kelompok kedua adalah masyarakat Madura – yang sebagaimana masyarakat Melayu- beragama Islam. Karena itu, faktor-faktor yang memotivasi kerusuhan massal di Kalimantan Barat bukan masalah keagamaan, melainkan masalah etnik. Kerusuhan massal Kalimantan Barat kebanyakan terjadi di daerah Sambas dan Pontianak di akhir tahun 1996, dan terus berlanjut hingga awal 1997. Skala kerusuhan belum pernah terjadi sebelumnya.⁴

Berdasarkan beberapa kasus konflik yang diungkapkan oleh Azyumardi Azra dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi di Indonesia sarat dengan muatan “nasionalisme lokal” atau sentimen separatisme yang kuat, juga sarat dengan nuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Selain itu, juga terdapat kecenderungan konflik disebabkan kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan sistem negara. Hal tersebut dijelaskan dalam teori konflik sebagai berikut:

1. Teori Konspirasi. Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa konflik agama merupakan hasil konspirasi tingkat tinggi para elit politik dengan cara mengacak-acak “struktur sosial” yang sudah mapan. Kemunculan konflik agama pada dasarnya tidak lebih dari sekedar *intermediary* target guna memenuhi tujuan berikutnya, yakni ambisi politik dan *vasted interest* jangka pendek, sekalipun harus melalui pengorbanan masyarakat bawah.

Tidak jarang seorang elit politik memanfaatkan simbol-simbol agama untuk menciptakan konflik di daerah basis pemilihannya, kemudian

⁴Disadur dari Azyumardi Azra, *Kerusuhan-kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-baru Ini :Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme*, dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Jakarta: INIS, 2003), h. 61-75

dengan gagah berani datang sebagai pahlawan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tidak sedikit pula memanfaatkan konflik sepele yang terjadi di masyarakat menjadi konflik agama guna mengacaukan basis lawan politiknya. Bahkan terkadang mereka sengaja memelihara suatu konflik untuk menjaga kepentingan politiknya.

2. Teori kesenjangan sosial (*social gap*). Teori ini mengandaikan bahwa sebab-sebab timbulnya konflik tidak bisa dilepaskan dari tingkat kehidupan ekonomi antar berbagai penganut agama yang tidak seimbang sehingga berujung pada munculnya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini pada akhirnya menciptakan kontestasi sosial-ekonomi yang tidak sehat di antara kelompok-kelompok masyarakat yang bersaing. Cara-cara kekerasan fisik tidak jarang dipakai sebagai jalan terakhir ketika cara-cara elegan menemui jalan buntu.

Faktor kesenjangan sosial biasanya disebabkan karena adanya perebutan lahan atau sumber ekonomi potensial di suatu daerah, yang sering diistilahkan dengan “lahan basah dan lahan kering”. Hal tersebut menjadi lahan konflik baru di masyarakat dimana yang kalah akan menempati lahan kering dan hidup dengan kemiskinan. Dari kesenjangan sosial tersebut akan menimbulkan gesekan-gesekan yang sewaktu-waktu akan meledak bila muncul pemicunya. Kesenjangan kehidupan sosial ekonomi juga bisa disebabkan oleh kesenjangan antara pemerintah pusat yang dianggap telah mengeksploitasi kekayaan alam yang melimpah daerah-daerah yang notabene masyarakatnya miskin. Masyarakat pun tak ubahnya “pembantu atau pelayan di negeri sendiri”, sebab seluruh hasil kekayaan daerah dibawah ke pusat (baca: Jakarta), sebagaimana yang pernah diperaktekkan oleh penguasa Orde Baru. Era Reformasi dengan isu desentralistiknya membawa angin segar bagi pemerintah daerah untuk mengelola kekayaannya sendiri. Namun desentralisasi bukanlah tanpa masalah, bila pada Era Orde Baru pemerintah pusat menjadi raja, kini bermunculan raja-raja baru di daerah yang tak ubahnya penguasa Orde Baru. Tidak hanya itu, dewasa ini muncul fenomena baru yakni politik ekonomi dimana kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada pemilik modal besar atau kelompok tertentu. Salah contoh politik ekonomi adalah adanya pembiaran atas menjamurnya “Super Market” yang beroperasi di kampung-kampung dan jantung prekonomian masyarakat kecil yang berdampak pada penggusuran pasar rakyat dan matinya sendi-sendi perekonomian masyarakat kecil.

3. Teori mobilisasi sosial. Teori ini dipakai untuk menganalisis gejala mobilisasi sosial yang terlalu cepat di kalangan kelompok masyarakat agama –etnik pendatang baru (*new comers*) yang biasanya menciptakan

gejala kecemburuan sosial di kalangan penduduk lokal. Yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

4. Teori relasi kuasa (*power relation*) dan teori struktural-fungsional seringkali dipakai secara bersamaan untuk menjelaskan fenomena sosial-politik rezim Orde Baru yang teramat sentralistik, semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat, sementara daerah tidak diberi wewenang sedikitpun untuk mengurus persoalannya sendiri. Contoh kecil dari fenomena ini adalah penunjukan orang tertinggi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang selalu ditentukan oleh pusat, sehingga putra terbaik daerah selalu terpinggirkan perannya. Dari fenomena tersebut melahirkan konflik di daerah.⁵ Era reformasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak menjamin bahwa intervensi pusat terhadap daerah telah hilang sama sekali. Intervensi tersebut boleh jadi masuk dalam aspek lain seperti dunia pendidikan, kesehatan, perbankan dan lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, harus diakui bahwa agama merupakan salah satu faktor pemicu konflik meskipun bukan satu-satunya faktor. Walaupun demikian diakui bahwa faktor agama, lebih tepatnya sentimen agama, dijadikan alasan yang efektif untuk memicu konflik atau kerusahan, walau isu pertamanya bukan persoalan agama. Dalam arti lain, agama dijadikan trigger terjadinya konflik dan kerusahan di Indonesia. Untuk itu, perlu mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan setiap konflik tanpa berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Beberapa konflik di atas, hanyalah sebagian kecil dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik-konflik tersebut setiap saat akan meledak lagi bilamana muncul pemicunya..

Jika kita kembali kepada ajaran agama bahwa ajaran kebaikan, cinta kasih dan kerukunan, secara normatif-doktriner selalu diajarkan. Tetapi, kenyataan sosiologis seringkali memperlihatkan sebaliknya, agama justru menjadi ajang konflik yang tak kunjung reda.⁶ Menurut Arthur J. D'Adamo, *Religion's way of knowing* dalam Samiang Katu, sebagai akar dari konflik-konflik antar umat beragama. Umat beragama yang tidak kritis terhadap ajaran agamanya berkeyakinan bahwa agamanya memiliki ajaran: 1) Bersifat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran yang tanpa kesalahan

⁵Lihat, Thoha Hamim dkk., *Resolusi Konflik Islam Indonesia* (Cet. I; Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), h. 26

⁶Zulkarnain, dkk, *Model Landasan Sosial antara Umat Beragama dalam Memelihara Ketahanan dan Kertertiban Masyarakat Miskin pada Daerah Terpencil dan Terisolasi di Pulau Enggano* dalam *Sinopsis dan Indeks Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Tahun 1999-2003* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2004), h. 5

sama sekali; 2) Bersifat lengkap dan final – dan karena itu memang tidak diperlukan kebenaran dari agama lain; 3) Kebenaran agamanya sendiri dianggap merupakan satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan atau pembebasan; dan 4) Seluruh kebenaran itu diyakini original dari Tuhan, tidak ada konstruksi manusia.⁷

Menyikapi keempat akar konflik antar agama di atas, Budhy Munawar Rachman mengatakan bahwa hal tersebut menjadikan agama sebagai sumber ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama. Mereka terperangkap pada klaim-klaim hanya agamanyalah yang benar, sementara yang lain salah. Kondisi riil seperti ini, jika dipandang dari sudut teologis dan epistemologis menjadi penyebab munculnya kebingungan di antara umat beragama, ketika menyaksikan bahwa di sekitar mereka, penganut agama lain juga berkeyakinan bahwa hanya agamanyalah yang paling benar, sementara yang lainnya salah. Akibat selanjutnya, agama yang satu menjadi ancaman bagi agama yang lain. Dalam kondisi seperti ini, seringkali persoalannya semakin rumit dan kompleks, bilamana persoalan politik ikut serta di dalamnya. Logikanya pun menjadi : “siapa kebetulan berkuasa, dialah yang akan mendominasi yang lain”.⁸ Moch Qasim Mathar menyatakan bahwa klaim kebenaran pada agama dan keyakinan sendiri – dan kebatilan (kesesatan) di pihak umat lain – sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah umat-umat dari agama-agama yang berbeda. Sampai hari ini, di kalangan umat Islam, klaim tersebut masih dijumpai. Sejarah pemikiran Islam yang meliputi teologi, filsafat, dan mistisisme (tasawuf) telah mencatat kelompok-kelompok teologi tertentu mengkafirkan kelompok teologi Islam lainnya yang berbeda. Pemikiran-pemikiran filsafat dan tasawuf pun, di antaranya mengalami pengkafiran serupa. Tentu tuduhan pengkafiran itu menjadi amat serius kalau yang dituduh sampai dihukum mati.⁹

Kenyataan seperti inilah telah direkam dalam *blue print* buku-buku sejarah konflik antar agama. Dengan demikian, jelaslah bahwa sumber-sumber konflik antar umat beragama, berasal dari cara pemahaman agama

⁷Dikutip dari Samiang Katu, *Paradigma Baru: Hubungan Antara Islam dan Kristen (Pilar Utama Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Orasi Pengukuhan Guru Besar Bidang Perbandingan Agama, IAIN Alauddin Makassar, 2003. h. 16

⁸Lihat, Budhy Munawar-Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. Xi.

⁹Dikutip dari Moch Qasim Mathar,, *Kimiawi Pemikiran Islam –Arus Utama Islam di Masa Depan*. Orasi Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat dan Pemikiran Modern dalam Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2007. h. 3

yang sifatnya parsial dan tidak komprehensif. Di samping itu, keyakinan penganut agama lain di luar dirinya, dinilai berdasarkan konsep keyakinannya.

Meski demikian, konflik itu sendiri sesungguhnya memiliki peluang dan ancaman di dalam dirinya. Karena itu, pengelolaan konflik secara cerdas dalam hal ini sangat dibutuhkan agar penyelesaian konflik membawa pada suatu kehidupan bersama yang lebih baik (peluang), bukannya malah mengorbankannya untuk kemudian meledak dalam bentuk kekerasan (ancaman). Jadi, hal yang utama bukanlah bagaimana meniadakan konflik, tapi bagaimana mengelola konflik tersebut secara benar melalui penggunaan saluran-saluran yang benar, agar tidak berujung pada kekerasan. itu artinya, masyarakat pun dapat belajar untuk hidup damai di tengah kema-jemukan bangsa.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi konflik antara lain:

1. Menggunakan kekuasaan dalam rangka mencegah konflik yang terjadi ke wilayah lain. Kekuasaan ini harus berdasarkan tindakan yang bijak dan tidak dipengaruhi oleh motif yang emosional.
2. Memperlancar usaha kedua belah pihak untuk menurunkan ketegangan melalui cara-cara diplomatis. Situasi panas harus lebih dahulu didinginkan, dengan cara, antara lain: penggunaan metode persuasif tapi bukan dengan paksaan karena hal ini hanya akan mendorong tindakan paksa dari yang lain yang pada gilirannya akan menimbulkan kerugian pada orang atau kelompok lain.
3. Upaya menghindar, itulah watak manusia untuk menghindari konflik sesudahnya yang berkepanjangan. "Menghindarkan diri" adalah salah satu sifat arif yang harus dimiliki masyarakat. Sebuah konflik biasanya berasal dari "mulut" dan dari ucapan yang menyakiti orang lain. Perlu diingat bahwa kadang-kadang mulut seseorang bisa merugikan dan menciptakan nasib buruk bagi orang lain. Memelihara lidah dan ucapan dengan baik, serta bijak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita.¹⁰

Selanjutnya penulis menawarkan beberapa alternatif solusi konflik sebagai berikut:

1. Agama sebagai jalan keselamatan

Setiap agama mengajarkan kepada umatnya jalan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di Akhirat. Namun jalan keselamatan

¹⁰William Chang, *Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama*, dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Jakarta: INIS, 2003), h. 28-29

tersebut tentunya berbeda antara satu agama dengan agama lainnya. Perbedaan pemahaman tidak hanya terjadi antar agama tetapi juga terjadi pada internal agama. Perbedaan pemahaman adalah hal yang wajar karena disebabkan karena berbagai macam faktor, misalnya: perbedaan pendakatan atau sudut pandang yang digunakan dalam menafsirkan ajaran agama, begitupula kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan faktor lainnya yang melingkupi sang penafsir ketika ia menafsir ajaran agama. Namun perbedaan-perbedaan tersebut harus disikapi secara arif dan bijaksana. Segala permasalahan harus didialogkan dan dimusyawarakan sehingga tercapai kata mupakat, setidaknya kita sepakat “untuk berbeda” tanpa harus berkonflik. Dalam rangka mengantisipasi konflik antar agama dan internal agama, maka “agama sebagai jalan keselamatan” dapat menjadi alternatif pemahaman yang ditengarai mampu mempertemukan segala perbedaan umat.

2. Mempertimbangkan penghapusan term agama *samawi* (langit) dan *wadh'i* (bumi)

Secara psikologis, setiap orang merasa senang dan dihargai bilamana agamanya tidak dicap dengan term “negatif”. Dewasa ini, salah satu isu penyebab lahirnya konflik agama adalah adanya klaim agama *samawi* dan *wadh'i*. Agama *Samawi* diklaim sebagai agama yang diwahyukan oleh Tuhan kepada nabi-Nya dan disampaikan kepada umat manusia, sedangkan agama *wadh'i* (bumi) adalah agama yang lahir dari hasil kreasi dan renungan manusia. Term ini akhirnya menimbulkan kesan bahwa agama langit berhak untuk menginvasi agama bumi yang akhirnya menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah “apakah ada orang yang rela menerima secara ikhals bilamana dia dicap sebagai penganut agama bumi?, kriteria apa yang digunakan untuk mengkalifikasi agama ini?, siapa yang berhak memutuskan bahwa suatu agama masuk dalam kategori *samawi* atau *wadh'i*? siapapula yang memberikan hak istimewa tersebut?, perlukan mempertahankan pendikotoman agama *samawi* dan *wadh'i* tersebut?. Klaim agama *samawi* dan *wadh'i* pada akhirnya akan melahirkan term tandingan dari pihak yang merasa dirugikan misalnya term “agama asli” vs. “agama infor” dengan titik tolak agama yang pertama dianut oleh bangsa Indonesia. Jika klaim ini tetap dipertahankan maka akan melahirkan konflik psikologi yang berkepanjangan.

Setiap umat dari setiap agama tentunya memiliki konsep tersendiri tentang Tuhan, pembawa ajaran (nabi), kitab suci, dan lainnya tanpa harus memakai konsep atau kriteria agama lain dalam memahami agamanya. Untuk itu, dalam rangka membangun kerukunan umat beragama dan mewujudkan perdamaian di Indonesia seharusnya term-term negatif yang

dialamatkan kepada suatu agama seharusnya dipertimbangkan untuk dihapus termasuk term agama *samai* dan *wadh'i*.

3. Mempertimbangkan penghapusan term agama negara dan non – negara/ resmi vs tidak resmi.

Term lain yang juga mengundang ketidakharmonisan umat beragama adalah term agama negara/agama resmi dan non-negara/ agama tidak resmi. Agama negara adalah agama yang diakui oleh negara sedangkan non-negara tidak mendapat pengakuan dan sebagai konsekwensinya harus bergabung dengan agama negara. Dalam kasus Kong-hu-chu misalnya, pada era Orde Baru mereka mengalami tindak kekerasan karena dianggap agama yang menyimpang dan harus bergabung dengan agama resmi negara namun pasca reformasi bergulir, Gusdur pun membuka kerang agama dan menyatakan bahwa Kong-hu-chu sebagai agama. Sampai hari ini hanya 6 negara yang diakui oleh negara, padahal keinginan agama di luar 6 tersebut untuk diakui sebagai agama perlu mendapatkan apresiasi dari negara. Contohnya, Towani Tolotang di Sulawesi Selatan yang sejak Orde Baru berkeinginan diakui sebagai agama namun sampai hari ini belum mendapat persetujuan negara. Akhirnya merekapun terpaksa berpiliasi kepada agama resmi negara meskipun secara ajaran tidak sama dengan agama tersebut. Bilang dalam bidang budaya Indonesia sangat antusias untuk memasukkan budaya-budaya lokal dan asing sebagai bagian dari budaya nasional kenapa dalam bidang agama tidak legowo menerimanya. Sebuah potret sifat ambigu negara yang lahir dari ketidakmampuan negara untuk memberikan hak setiap warganya.

4. Penguatan Dialog dan Kerjasama antar penganut agama

Isu penguatan dialog dan kerjasama antar penganut agama bukanlah hal yang baru. Pemerintah lewat FKUB-nya telah melakukan berbagai macam program dialog di daerah yang berkonflik. Bukannya tanpa hasil, hanya saja realitas menunjukkan bahwa terulangnya konflik di berbagai daerah ini merupakan bukti nyata dialog tersebut belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor: a) Dialog hanya terbatas pada kalangan elit masyarakat, tokoh adat, atau tokoh pemuda saja. Bahkan terkadang hanya melibatkan orang-orang yang sama sekali tidak bersentuhan dengan konflik secara langsung, b) Tujuan dialog terkadang tidak tercapai karena adanya alasan keterbatasan atau efisiensi dana dengan mempersingkat acara tersebut, yang tadinya direncanakan 4 hari kemudian dipersingkat 1-2 hari saja. c) Program dialog hanya bersifat jangka pendek. Umumnya, setelah selesai kegiatan dialog, maka selesai pulalah rangkaian acara, sehingga dampak positif dari kegiatan tersebut tidak menjadi tolak ukur bagi perumusan program selanjutnya. d) Dialog hanya bersifat reaktif,

artinya program dialog akan dilakukan bilamana telah terjadi konflik dan menelan korban. Tidak ada upaya maksimal dari pemerintah untuk mengalokasikan dana dalam rangka sosialisasi langkah antipasti konflik di seluruh daerah. Harus dipahami bahwa setiap daerah memiliki potensi konflik yang berbeda-beda. Selain mencanangkan program penguatan dialog ke seluruh daerah di Indonesia, masyarakat pun didorong untuk menyadari pentingnya dialog antar agama dalam kehidupan sehari-hari, dari dialog tersebut akan tercipta kesepahaman-kesepahaman dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut kesepahaman tersebut akan berpengaruh positif dalam aspek kerjasama baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lainnya.

5. Penguatan Pendidikan Berbasis Perdamaian

Sampai hari ini belum ditemukan materi pelajaran pendidikan berbasis perdamaian dalam kurikulum pendidikan. Jika pendidikan anti korupsi kini telah diajarkan di perguruan tinggi akibat banyaknya koruptor dari kalangan akademisi, maka kedepan seharusnya pemerintah dan pemerhati pendidikan mempertimbangkan materi pendidikan berbasis perdamaian yang diajarkan sejak dini, yakni sejak usia SD. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pemotongan generasi konflik sejak dini. Jika ini diprogramkan maka 1-2 tahun, hasilnya mungkin masih terkontaminasi dengan bias konflik tetapi generasi ketiga dan seterusnya akan bebas dari bias konflik tersebut. Solusi di atas tentunya hanya sebagian kecil solusi yang ada. Setiap daerah tentunya memiliki potensi konflik yang berbeda. Untuk itu, dibutuhkan kearifan dalam menyikapinya.

C. Penutup

Berbagai macam solusi konflik agama telah dirumuskan oleh para pemerhati konflik di Indonesia. Namun solusi tersebut sifatnya relatif dalam penerapannya. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan potensi konflik di setiap daerah. Belum lagi agama bukanlah satu-satunya pemicu konflik. Semakin kompleks penyebab konflik di suatu daerah semakin kompleks pula solusi yang seharusnya diterapkan.

Untuk itu, setiap warga negara berkewajiban untuk melaksanakan upaya antisipatif dan penyelesaian konflik sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Di mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Konflik mungkin tidak dapat dihindari karena sifatnya alamiah tetapi mencegah meluasnya konflik sangat ditentukan oleh keseriusan kita semua dalam menyikapinya. Menurut hemat penulis, penting membangun kembali kesadaran awal dari penganut agama untuk meyakini bahwa setiap agama memiliki ajaran keselamatan dan penghargaan yang tinggi terhadap sesama, penting pula untuk mempertimbangkan penghapusan term-term

negatif yang secara psikologis sangat mengganggu kehidupan beragama, tak kala pentingnya juga format baru dalam penguatan dialog dan kerjasama antar umat beragama, dan terakhir adalah perlunya gagasan pendidikan berbasis perdamaian jika kita ingin generasi bangsa ini tidak terjebak virus konflik agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Kerusuhan-kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia Baru-baru Ini :Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme*, dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* Jakarta: INIS, 2003.
- Chang, William. *Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama*, dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* Jakarta: INIS, 2003.
- Hamim, Thoha. dkk., *Resolusi Konflik Islam Indonesia* Cet. I; Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007.
- Katu, Samiang. *Paradigma Baru: Hubungan Antara Islam dan Kristen (Pilar Utama Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Orasi Pengukuhan Guru Besar Bidang Perbandingan Agama, IAIN Alauddin Makassar, 2003.
- Mathar,, Moch Qasim. *Kimiawi Pemikiran Islam –Arus Utama Islam di Masa Depan*. Orasi Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat dan Pemikiran Modern dalam Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2007
- Miall, Hugh. Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, diterjemahkan oleh Tri Budhi Sasrio dengan judul *Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mudzhar, M. Atho *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rachman, Budhy Munawar- *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* Jakarta: Paramadina, 2001
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Zulkarnain, dkk, *Model Landasan Sosial antara Umat Beragama dalam Memelihara Ketahanan dan Ketertiban Masyarakat Miskin pada Daerah Terpencil dan Terisolasi di Pulau Enggano* dalam *Sinopsis dan Indeks Hasil Penelitian Kompetitif Dosen PTAI Tahun 1999-2003* Cet. I; Jakarta: 2004.